



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Bangka Pos

Rakyat Pos

Radar Bangka

Babel News

Babel Pos

Lainnya : _____

Tanggal:

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

2
0
1
9

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Beasiswa Mahasiswa STPN DISUNAT?

Cair 50 Persen Dewan Panggil Dinas Pendidikan Bangka

SUNGAILIAT - Sebanyak 11 alumni Mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang mendapatkan beasiswa utusan daerah dari APBD Kabupaten Bangka tahun 2016 mempertanyakan kejelasan dana senilai Rp40 juta

yang mereka dapat. Pasalnya hingga lulus tahun 2017 silam, ke 11 alumni ini tidak mendapatkan haknya secara utuh. Dari nilai Rp40 juta mereka hanya menerima Rp.20 juta saja yang dicairkan via rekening.

Tentunya nilai tersebut mereka ketahui setelah menandatangani lembaran hitam diatas putih oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka. Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka, Magrizon kepada wartawan Senin (20/5/2019) kemarin mengatakan pihaknya sudah menerima pengaduan atau aspirasi alumni STPN yang mendapat beasiswa utusan



ke Hal 11 Kol 5

Beasiswa Mahasiswa STPN Disunat?,

daerah tahun 2016. Namun pada kenyataannya hingga mereka lulus di tahun 2017 permasalahan tersebut belum juga selesai.

"Kami menerima pengaduan atau aspirasi dari beberapa mahasiswa yang mengenyam beasiswa utusan daerah tahun 2016 dan kenyataannya mereka (11 alumni STPN-red) selesai tahun 2017. Dan saat ini mengabdikan di Kabupaten Bangka masalah itu belum juga rampung," ujar Magrizon di Gedung DPRD Kabupaten Bangka.

Magrizon menjelaskan permasalahannya uang saku atau uang bantuan biaya hidup yang dijanjikan Pemkab Bangka tidak sesuai dengan yang ditandatangani.

Dari Rp40 juta dana yang tertera dalam lembaran hanya dicairkan 50 persen saja.

"Permasalahannya adalah sesuai yang mereka sampaikan kepada kami bahwa uang saku

atau uang yang dijanjikan bantuan biaya hidup dari dinas atau dari Pemkab setelah mereka selesai tidak sesuai dengan apa yang mereka sudah tandatangan. Jadi nilai nominalnya Rp.40 juta selama 1 tahun. Tapi yang teralisasi sekitar 50 persen. Teknisnya mereka tandatangan untuk pencairan keseluruhan. Apakah cara dinas mencairkan dananya atau manajemennya seperti itu," jelas Magrizon.

Ia mencium adanya kejanggalan dalam penerimaan beasiswa ini sehingga sesuai fungsinya, Komisi I DPRD Kabupaten Bangka akan segera memanggil pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka untuk mengetahui permasalahan sebenarnya.

"Untuk mengetahui permasalahan ini. Kami tidak akan tinggal diam. Kemungkinan usai Lebaran kami akan panggil OPD tersebut. Masalah ini harus clear. Fungsi kami bukan menyelidiki tapi mengingatkan

bahwa sepertinya permasalahan ini sudah 2017 sampe akhir tapi belum selesai juga. Kami akan tindak lanjuti ke OPD terkait dan disini menurut saya ada kejanggalan. Mungkin secara administrasinya saya juga belum jelas," tukasnya.

Ia menilai dengan terjadinya permasalahan seperti ini tentu saja dapat mengganggu konsentrasi belajar mahasiswa penerima beasiswa lantaran tak semua mahasiswa yang dalam kategori mampu.

Sayangnya, wartawan belum dapat mengkonfirmasi permasalahan ini ke Dinas terkait. PLT Sekda Kabupaten Bangka, Ahmad Muchsin saat hendak ditemui wartawan di ruang kerjanya enggan memberikan komentar dan menyarankan langsung ke OPD terkait. Namun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, Andi Hudirman saat dikonfirmasi via ponselnya belum memberikan keterangan lebih lanjut. (2nd/6)